

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita, Rahardjo. (2023). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [2] Aprillia, dkk. 2022. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [3] Asy'ari, Sapari Imam. (2019). *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- [4] Blanchard, Olivier dan Lorosa. (2017). *Macroeconomics*. United States of America : Pearson.
- [5] Djopari dan Solihah, Ratna. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [6] Effendi, Bachtiar. (2022). *Hal Utama dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [7] Fahmi, I. 2020. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, Vol. 5, No. 1, h. 62-81.
- [8] Fauziah, Luluk. (2020). *Modul Kuliah: Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan*.
- [9] <https://sidorejo.kendalkab.go.id/hubungikami>
- [10] Kotler & Amstrong,. (2022) *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- [11] Kurniati, Haura. (2020). *Laporan Praktik Kerja Lapangan Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta
- [12] Nasdian, & Tonny, Fredian. (2019). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [13] Nurcholis, Hanif. (2021). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [14] Nurcholis. 2021. Aplikasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) akar putri malu terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang panjang (*Vigna sinensis L.*). *Jurnal Agrisistem*. 17(1): 10 – 18.
- [15] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.

- [18] Siagian, P. Sondang. (2022). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [19] Sulistiyani, Teguh, Ambar. (2019). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- [20] Suryono, Agus. (2021). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- [21] Suci, I.A. (2019). *Fungsi Kehumasan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pengembangan Program Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Pakuan.
- [22] T. Coser dan Anthony Rosenberg. (1976). *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- [23] Theresia, Aprillia, dkk. 2019. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [24] Undang-Undang Dasar 1945
- [25] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [28] Utomo, T.W. (2019). *Materi Diklat Manajemen Pemerintahan: Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah*. LAN RI.
- [29] Utomo, T.W. (2019). *Materi Diklat Manajemen Pemerintahan: Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan Daerah*. LAN RI.
- [30] Widjaja, A.W. (2023). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [31] Yosefin. (2021). *Peran Profesi Akuntan Publik Dalam Dunia Akuntansi Digital Di Era New Normal*. *Digipreneur*, 1(1), 40–48.